

Bencana Bukan Murka Melainkan Akumulasi Kerusakan Alam

Oleh: Herry Naif

Manajer Program WALHI NTT

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (*Lih. UU No. 24 Tahun 2007*). Tentunya dampak bencana mengkhawatirkan komunitas yang berada di lokasi bencana.

Bersahabat dengan ancaman adalah pilar utama yang membangkitkan optimisme manusia dalam menghadapi bencana. Bila dipotret dari peta bencana, Indonesia adalah daerah *ring of fire*. Hampir seluruh kepulauan Indonesia rentan bencana terkecuali pulau kalimantan.

Potret buram ini tidak harus dirisaukan, apabila kapasitas masyarakat melebihi ancaman. Resiko bencana menjadi kecil seiring meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap bencana. Sebaliknya bencana membawa keraguan publik bila kapasitas dirinya sangat rendah dibanding dengan timbulnya ancaman. Ini dibutuhkan penanggulangan bencana yang inheren dan koheren dengan berbasis pada analisis asset penghidupan; manusia, alam, fisik, sosial dan finansial. Apakah kelima aset penghidupan ini sungguh dipersiapkan untuk menghadapi kondisi kedaruratan.

Penanggulangan bencana adalah seluruh rangkaian hal yaitu: memahami dan memetakan, kegiatan yang meliputi aspek perencanaan bahaya; memantau dan meramalkan peristiwa dan penanggulangan bencana sebelum, saat peristiwa yang akan segera terjadi; memproses dan sesudah terjadi bencana yang mencakup dan menyebarkan peringatan kepada pihak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap berwenang dan kepada masyarakat; dan darurat dan pemulihan. Melakukan tindakan mestinya tepat waktu sebagai peringatan. Sedangkan, pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan jika mungkin pengkajian/analisis risiko adalah suatu upaya menghilangkan sama sekali atau metodologi untuk menentukan sifat dan ancaman sebatasi cakupan risiko dengan melakukan analisis meminimalkan bencana-bencana lingkungan, terhadap potensi bahaya dan mengevaluasi teknologi dan biologi terkait.

Paradigma penanggulangan bencana yang bernuansa tanggap darurat mestinya diubah menjadi Pengurangan Resiko Bencana. Atau diungkap dalam sebuah adagium “lebih baik diobati daripada disembuhkan”. Berarti upaya preventif lebih mujarab dibanding dari upaya kuratif. Begitupun dalam konteks kebencanaan, masyarakat semestinya dipersiapkan secara dini dipersiapkan sebelum datangnya bencana.

Analisis risiko didasarkan pada peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, tinjauan tentang ciri-ciri teknis bahaya, seperti: merubah sikap dan perilaku terkait dengan lokasi, dampak kerusakan, frekuensi dan pengurangan risiko bencana berperan dalam kemungkinan, serta diaksentuasikan pada analisis tentang meningkatkan suatu “budaya pencegahan”. Aspek fisik, sosial dan ekonomi dari kerentanan investasi bencana dan cara-cara biaya/manfaat, tindakan-tindakan sekaligus memberi pertimbangan khusus pada Pengelolaan risiko bencana.

Berbagai kajian sektoral perlu dilakukan dalam bidang pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan maupun usaha kecil dan menengah. Kajian-kajian ini harus disertai penilaian risiko bencana, termasuk analisis dampak bencana di masa lalu. Kerentanan infrastruktur sosial dan fisik, serta implikasi risiko bencana terhadap pembaruan dan perubahan-perubahan struktural yang tengah dijalankan. Kajian-kajian ini juga harus menjelaskan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko, termasuk penyesuaian tujuan-tujuan dan kegiatan lain yang

direncanakan.

Dari pemahaman ini, bio-regional NTT yang berkarakter kepulauan dan termasuk kawasan *ring of fire*. NTT juga memiliki banyak pulau yang gersang, terkecuali wilayah Maggarai. Malah di beberapa tempat di Pulau Timor, Sumba dan Flores memiliki keterbatasan air. Iklan "*sumber air su dekat, kotong tidak terlambat lagi*" adalah sebuah ungkapan yang ironis bagi masyarakat Timor.

Di tengah krisis ekologi, pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten mengeluarkan begitu banyak Surat Kuasa Pertambangan (SKP). Kebijakan ini dinilai tidak sinkron dengan paradigma pengurangan resiko bencana.

Upaya perlindungan ekologi hendaknya menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar. Proses pemulihan ekologi melalui perluasan wilayah kawasan penyanggah dan perbaikan atas sistem pertanian berkelanjutan perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Tidak ada artinya bila setiap kabupaten sudah dihiasi dengan BPBD dan program penanggulangan bencana tetapi proses penggerukan alam dan pengrusakan (pertambangan) oleh Dinas Pertambangan dan Energi melalui tindakan eksploitasi terus dilakukan. Argumentasi dasarnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini adalah sebuah kebijakan yang tidak sinergis. Kiat pemulihan ekologi menjadi semu dan harapan akan peningkatan PAD menjadi absurd.

Padahal, ada begitu banyak kearifan lokal di NTT yang bernuansakan perlindungan bumi dan pengurangan risiko bencana itu diakomodir dalam kebijakan pemerintah. Tidak akan mengurangi otoritas pemerintahan di NTT bila kearifan itu diakomodir dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintahan.

Mayoritas penduduk NTT (petani) dan berbagai mata pencaharian lainnya yang masih bergantung pada kondisi keseimbangan ekologi. Diyakini penciptaan iklim mikro dapat memperbaiki pendapatan mayoritas penduduk NTT yang masih sangat bergantung pada alam.

Perubahan Iklim dan Dampaknya

Perubahan iklim, *climate change* adalah suatu perubahan statistik yang signifikan pada pengukuran keadaan rata-rata atau ketidakkonsistenan iklim di suatu tempat atau daerah selama periode waktu yang panjang, yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh dampak kegiatan manusia pada komposisi atmosfer global atau oleh ketidakkonsistenan alam.

Perbincangan perubahan iklim menjadi interest para pihak di berbagai level, mulai dari konfrensi tingkat tinggi pemerintah antar negara, tingkat nasional dan daerah, bahkan sampai pada tingkat perbincangan masyarakat sehari-hari. Kesadaran para pihak akan pentingnya menyusun kebijakan, strategi dan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dampaknya semakin dirasakan. Perubahan iklim pun ditenggarai berkontribusi pada peningkatan frekwensi dan intensitas ancaman/bahaya bencana yang terkait iklim (*climate related hazards*) seperti banjir, longsor, kekeringan, gelombang panas, badai, kebakaran, dll yang berujung pada meningkatnya risiko dan dampak bencana.

Bencana banjir, kekeringan, badai, longsor dan kebakaran hutan telah menyebabkan banyak kehilangan nyawa manusia dan penghidupan terkait dengan iklim, serta hancurnya ekonomi dan infrastruktur sosial dan kerusakan lingkungan. Di banyak tempat di dunia, frekuensi dan intensitas bencana ini cenderung meningkat (Sivakumar, 2005). Banjir dan badai mengakibatkan 70% dari total bencana dan sisanya 30% diakibatkan oleh kekeringan, longsor, kebakaran hutan, gelombang panas, dan lain-lain.

Pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim melalui Pepres Nomor 46 Tahun 2008 dan penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Mitigasi dan Adapatasi Perubahan Iklim hendaknya tidak hanya menjadi penghias struktur namun harus diperankan dalam upaya penjinakan bencana

massif yang terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia memiliki karakteristik geografis dan geologis yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yakni sebagai negara kepulauan (memiliki 17.500 pulau kecil), memiliki garis pantai yang panjang (81.000 km), daerah pantai yang luas dan besarnya populasi penduduk yang tinggal di daerah pesisir.

Potret Buram Penanganan Bencana

Gempa berkekuatan 7,2 skala richter yang diikuti tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat menewaskan 112 orang, 502 lainnya dinyatakan hilang dan 4.000 keluarga mengungsi. Bencana banjir bandang Wasior, Kabupaten Teluk Wondowa, Papua Barat menelan korban 134 orang. Erupsi Merapi hingga hari ini telah menelan 277 orang, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Sedangkan Propinsi NTT juga dilanda berbagai bencana (Baca Tabel Bencana). Berbagai bencana tidak banyak membawa korban jiwa tetapi lebih banyak dialami korban material dari warga. Secara sederhana data ini ditampilkan untuk mengukur siklus kebencanaan di NTT. Tak dipungkiri bahwa NTT yang terdiri dari beberapa gugus pulau ini juga menjadi pelanggan bencana.

Tabel Bencana di NTT, Januari 2011

Waktu	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Korban		Respon
			Material	Manusia	
Desember 2010	Desa Skinu, Kecamatan Toiananas		38 rumah hilang tanpa bekas	361 KK diungsikan dari lokasi bencana	Bantuan dari Pemprov dan berbagai pihak lain
/11	G				
	a	g Beliung	it Rumah rusak	-	nur serahkan bantuan berupa: 1 ton beras, 100 lembar terpal, 100 lembar tikar dan bahan makanan lainnya seperti ikan kaleng, kecap, saus dan tomat. to Center Kupang serahkan 200 lembar seng.
	fa	g Beliung	it Rumah rusak	-	
	u	g Beliung	it Rumah rusak	-	
	ana	g Beliung	nit Rumah rusak	-	
	a	g Beliung	it Rumah rusak	-	
	i	g Beliung	it Rumah rusak	-	
	un Sabu	g Beliung	it Rumah rusak	-	
	in	g Beliung	it Rumah rusak	-	
	Total		umah	-	
09/01/11	g	Buruk	ra El Tari ditutup 4 Jam 6 Maskapai penerbangan tunda mendarat Perahu Nelayan tenggelam dihantam ombak		menginstruksikan penutupan bandara.
		or	ghuni rumah di sekitar wilayah longoran diungsikan ke rumah yang kosong	-	
11/01/11	g	bang capai 4-5 meter	aran laut dihentikan		menginstruksikan pelayaran kapal lintas pulau di NTT
/11	BELU				
	ng Bere Muti, Desa Nanaet, Kec. Nanaet Duabesi	or	Halilulik ke Nanaet	--	-
/11	S TIMUR				
	lun, Rt. 10, Rw. 03	r dari lereng gunung Mandiri	ah terhanyut	orban luka-luka, Theresia Ruron	bergotong royong membersihkan rumah dan para korban yang diterjang banjir.
/2010	Watu Manuk, Sikka	Pinang Tenggelam		rban jiwa, dan 9 korban belum ditemukan hingga hari ini.	rian jenasa dilakukan oleh Tim SAR dan malah ada keterlibatan Pemkab Ende, dalam pembangunan posko.
7-09/01/11	Wailamung, Kecamatan Wailamung, Kecamatan	r dan Gelombang Pasang	warga dan sumur air terendam air.	arga (36 KK) aki-laki dan 67	s dan BPBD Sikka turun menyerahkan bantuan berupa beras, terpal, mie dan bantuan obat-

	Talibura			perempuan). Para korban mengalami sakit perut dan pilek.	obatan dari Kesehatan Sikka
13/01/11	Nanghale, Kecamatan Talibura	bang Laut	mah terendam air	-	ta DPRD Sikka melakukan kunjungan lapangan. DPRD meminta Pemkab Sikka segera mengalokasikan bantuan kepada para korban.
06/02/11	Bhera (Kec. Mego) Desa Paga (Kec. Paga	r	a hektar sawah terendam banjir dan 2 ekor sapi dan beberapa kambing, sapi menjadi korban	-	Pihak Kecamatan, Desa dan LSM langsung mengunjungi lokasi bencana dan melakukan indentifikasi kerusakan.
	Samparong	Banjir	Puluhan rumah hancur	-	BPBD melakukan kunjungan lokasi dan pembangunan Posko Bencana
	ahan Waioti	bang Pasang	mah rusak ringan dan 2 rumah hilang	-	dibangun Posko Bencana
TIMUR					
11/01/11		r	tan Laijanji putus Wulawaijelu - Ngadungala	-	b Manggarai menyerahkan 22 ton beras kepada 22 KK dan 18 ton bagi 379 KK
	ngaru, Kecamatan Haharu	r	an jagung dan kacang tanah 2 ha		
MANGGARAI					
	Kecamatan Cibal dan Wae Rii	r	K tersebar di 18 desa di 14 Kecamatan (Kab Manggarai)		
		or	api 40 M jalan Nggorong - Pagal	-	terial sudah disingkirkan sehingga kembali normal

Sumber: Pemberitaan Pos Kupang

Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa NTT, Sumba, Timor dan Flores serta gugus pulau kecilnya adalah kawasan bencana. Dominasi bencana yang terjadi pada awal tahun 2011 di NTT adalah Banjir, Longsor, puting beliung. Selain itu, ada satu peristiwa yang boleh diklasifikasi sebagai bencana, seperti tenggelamnya kapal Karya Pinang di perairan Sadak-Watu Manuk dalam perjalanan dari Pulau Palue menuju Maumere. Dalam tragedi itu, 23 orang harus menjadi bayaran dari puting beliung dan ketidakjelasan manajemen angkutan antar pulau di NTT.

Dari beberapa bencana yang terjadi terlihat bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten di NTT terhadap bencana, secara tanggap darurat sudah cukup sigap. Bahwa hampir seluruh korban bencana mendapat perhatian pemerintah setempat. Tetapi tidak berarti bahwa pengalaman ini membuatnya terbuai dalam Tanggap Darurat. Paradigma tanggap darurat harus diubah menjadi Pengurangan Resiko Bencana (PRB), agar kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana terus ditingkatkan.

Solusi Mitigasi Perubahan Iklim

Disadari atau tidak, perubahan iklim telah terjadi akibat berbagai permasalahan krisis lingkungan. Akar masalahnya, Pemeritan Provinsi NTT dan Pemkab se-NTT belum maksimal mencermati kebijakan pengurusan sumberdaya alam.

Ada kesan, pengurusan sumberdaya alam lebih dikedepankan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologi, sosial dan budaya. Akibatnya, kelompok tertentu saja yang menguasai keuntungan pengelolaan sumberdaya alam. Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Kontrak Karya Pertambangan, Hak Pengelolaan Pesisir dan Perikanan (HP3) sebagai mekanisme formal untuk mengeksploitasi sumberdaya alam mulai dari pegunungan, hutan, perkebunan, pemukiman, pesisir, dan laut atas nama investasi. Padahal, kita memotret bahwa bencana, dapat disinyalir

terjadi di daerah–daerah krisis ekologi (akibat tindakan ekstraktif masyarakat dan pemerintah).

Mengantisipasi bencana di NTT, pemerintah perlu melakukan mitigasi pada kawasan–kawasan daerah ekologi genting akibat tindakan ekstraktif pemerintah misalnya melalui perijinan penebangan yang tidak terkontrol secara baik dan perijinan pertambangan. Selain itu, dilakukan pendidikan ekologi bagi rakyat agar terus membangun kultur cinta lingkungan. Ini bukan suatu hal baru sebab secara historis, hampir seluruh kepercayaan lokal itu bernuansa kosmosentris artinya percaya pada kekuatan alam. Alam dihormati sebagai sumber penghidupan yang harus dilestarikan. Namun ini kemudian termakan oleh virus penumpukan modal bagi segelintir orang yang menjadikan alam sebagai objek untuk dikeruk demi akselerasi pembangunan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT dituntut serius untuk melakukan pemulihan ekologi dengan melakukan penghijauan dan menghindari berbagai aktivitas perusakan lingkungan yang berdampak pada bencana. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendidikan kesiapsiagaan bencana di kawasan yang diidentifikasi sebagai daerah rentan. Misalnya; kawasan gunung api, kawasan hutan dan sungai dan berbagai daerah rentan lainnya. Hanya dengan jalan itu, rakyat dipersiapkan untuk selalu siaga bencana.

Sedangkan menyangkut bencana transportasi akibat adanya angin puting beliung ketika dalam pelayaran, pemerintah dituntut untuk memperbaiki manajemen dan sistem transportasi terutama kesiapan alat bantu keselamatan misalnya ketersediaan pelampung dan manifest penumpang juga harus diperhatikan sehingga mempermudah identifikasi korban. Bila kita memantau sistem transportasi antar pulau di NTT selain yang diurus PT. PELNI dan PT. ASDP hampir semuanya tidak memiliki sistem yang jelas. Herannya, banyak pengusaha yang berkecimpung dalam transportasi laut tanpa dilengkapi dengan perijinan bisa melakukan pengangkutan manusia antar pulau. Misalnya transportasi laut Maumere - Palue, Maumere - Pamana, Larantuka - Waiwadan, Larantuka - Solor dan berbagai kabupaten lain yang memiliki gugus pulau kecil yang harus dicapai dengan transportasi laut, belum diutamakan pada kelengkapan penyelamatan bila timbul bencana dalam perjalanan.

Padahal ini berakibat fatal. Tragedi tenggelamnya karya pinang harus menjadi contoh untuk memperbaiki sistem dan manajemen perhubungan laut antar pulau di NTT. Dengan kondisi perubahan iklim ini akan menimbulkan banyak bencana yang tidak diduga sebelumnya. **